

Dominasi Oligarki dan Praktik *State Capture* Dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Yayan Hidayat

Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

(Email: yyanhidayat20@gmail.com)

Abstract

The conflict between Indigenous Peoples and P. Toba Pulp Lestari (PT TPL) has been going on for more than three decades and has not led to a resolution. The practice of state capture and oligarchy in PT TPL conflict with Indigenous Peoples dominates almost all conflicts. The political network and material power that PT TPL has with the Government have strengthened the company's existence. The aim of this research is to identify the relationship between the Oligarchy and the State in the conflict between Indigenous Peoples and PT TPL. This research uses qualitative methods with case studies to dissect complex and dynamic relationship patterns in this conflict. This research found that there had been bartering of the interests of the State and the Oligarchy in the TPL case. The diversity of material power they possess makes the oligarchy politically significant in 'controlling' state policy.

Keywords:

State, Indigenous Peoples, PT TPL, Oligarchy, State Capture

Abstrak

Konflik masyarakat adat dengan PT TPL telah berlangsung selama tiga dekade lebih dan tak berujung pada penyelesaian. Praktik *state capture* dan oligarki pada konflik PT TPL dengan masyarakat adat mendominasi di hampir seluruh konflik. Jaringan politik dan kekuatan material yang dimiliki oleh PT TPL dengan Pemerintah telah memperkuat eksistensi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi relasi Oligarki dan negara dalam konflik masyarakat adat dengan PT TPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk membedah pola relasi yang kompleks dan dinamis dalam konflik tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi barter kepentingan negara dan oligarki dalam kasus TPL. Keragaman kekuatan material yang dimiliki membuat oligarki begitu signifikan secara politis dalam 'mengendalikan' kebijakan negara.

Kata Kunci:

Negara, Masyarakat Adat, PT TPL, Oligarki, *State Capture*

PENDAHULUAN

PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) telah beroperasi selama 30 tahun dengan konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten sekitar kawasan Danau Toba. IIU dimiliki oleh pengusaha Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo). Sejak tahun 1982, perusahaan IIU telah melakukan eksploitasi dan merambah masuk ke kampung-kampung yang dimulai dengan peta penunjukkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dasar hukum TPL beroperasi telah dilakukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali selama tiga dekade belakangan. Surat Keputusan terakhir yang mengatur TPL adalah SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Perubahan ini membuat luas areal kerja TPL bertambah. Eksploitasi TPL telah merampas wilayah adat dan melahirkan penderitaan bagi Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba. Begitu pula dengan semakin terdegradasinya ekosistem Danau Toba.

Area konsesi TPL merambah beberapa jenis kawasan hutan yang sebetulnya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seperti area konsesi di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 11.582,22 hektar, di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 122.368,91 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.017,43 hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar, dan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar. Dari 188.055 hektar konsesi TPL, setidaknya 28% (52.668,66 hektar) adalah ilegal karena berada di atas HL, HPK, dan APL (KPA, kpa.or.id, 2021).

Berdasarkan UU Kehutanan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, bahwa TPL sesungguhnya memiliki 141.537 hektar area konsesi ilegal karena berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL). Namun, pasca disahkannya UU Cipta Kerja, pelanggaran berat oleh TPL ini justru lolos secara hukum. Sebab, dalam UU Cipta Kerja telah mengubah aturan dimana Hutan Produksi Terbatas (HPT) digabungkan dengan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan kata lain, luas TPL menjadi bertambah secara legal (KPA, kpa.or.id, 2021).

Sejak awal berdirinya, pabrik pulp pertama di Indonesia ini penuh dengan sejarah konflik. Tuntutan masyarakat berisi sengketa tanah, penurunan kualitas udara dan air di sekitar Sungai Asahan, yang juga dikatakan bertanggung jawab atas penyakit kulit tertentu, menurunkan produksi perusahaan, dan masalah pencemaran air, pertanggungjawaban atas beberapa bencana tanah longsor di daerah tersebut, dan pelepasan gas klorin beracun selama ledakan boiler yang terjadi pada tahun 1993. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto, Indorayon menikmati kebebasan kegiatannya karena hubungan yang erat antara pemiliknya dengan Soeharto.

Demonstrasi dan tindakan hukum kepada instansi pemerintah yang dimulai sejak 1986 gagal menghentikan aktivitas pabrik yang pada gilirannya dijawab dengan penahanan, penangkapan, pemukulan, dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.

Jatuhnya Soeharto pada 1998, tekanan publik mulai tumbuh untuk menutup Indorayon, meski selalu dijawab dengan kekerasan dan teror oleh aparat keamanan yang disewa oleh perusahaan. Bentrokan antara penduduk setempat, staf dan anggota pasukan keamanan tidak dapat dihindarkan dan mengakibatkan enam kematian dan ratusan luka-luka pada tahun 1999. Akibatnya, Presiden Habibie menghentikan

sementara Indorayon pada 19 Maret 1999 dan menunjuk audit independen untuk menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pabrik, yang auditnya tidak pernah dilakukan. Keputusan tersebut kemudian didukung oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia saat itu Sony Keraf dari pemerintahan Presiden Gusdur bahwa produksi pulp kertas dan serat rayon Indorayon harus ditutup atau direlokasi.

Beberapa pendukung Indorayon, termasuk Menteri Perdagangan Jusuf Kalla saat itu, membantah tuduhan kasus pencemaran pabrik dan meminta perusahaan tetap dapat melanjutkan operasinya. Masalah tersebut juga meningkat menjadi masalah internasional karena Indorayon 86% sahamnya dimiliki oleh asing. Sebuah arbitrase internasional di Washington kemudian dibuka dan Presiden Gusdur menyatakan bahwa Indonesia harus mematuhi keputusan arbitrase tersebut. Khawatir akan ganti rugi US\$600 juta atau menghadapi gugatan internasional, menteri kabinet Indonesia memberi 'lampu hijau' bagi pabrik untuk kembali beroperasi pada Mei 2000 dengan persyaratan penghentian produksi rayon. Keputusan tersebut kemudian ditanggapi oleh oposisi lain dari masyarakat setempat dan beberapa kelompok aktivis lingkungan hidup seperti WALHI. Seorang mahasiswa ditembak mati selama demonstrasi penolakan pada 21 Juni 2000, puluhan tewas dan ratusan lainnya terluka parah selama 27 bulan konflik (Walhi, 2022).

Kisah panjang antara Indorayon Tanoto dengan masyarakat lokal berakhir dengan status ditutup pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Gusdur. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 15 November 2000, perusahaan berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Pada Maret 2003, setelah mengklaim memenuhi corporate social responsibility dengan memberikan bantuan, PT TPL kembali beroperasi dengan sistem yang diklaim ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini masalah PT TPL tetap tidak pernah hilang seperti isu pencemaran, deforestasi, pelanggaran hak Masyarakat Adat, maupun upaya permainan pajak perusahaan ini.

Satu dekade Pemerintahan Jokowi, PT TPL masih dengan bebas melakukan eksploitasi. Bahkan luasan izin konsesi mereka semakin bertambah. Melalui SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 membuat luas areal kerja TPL bertambah. Pada 3 Februari 2022, sejumlah aktivis yang menolak eksploitasi PT TPL bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan terjadi usai Jokowi mengikuti acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Akan tetapi, Presiden menyebutkan bahwa Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan terbuka. "Jadi harus pelan-pelan mempelajari persoalan ini" ungkap Presiden Jokowi. Hingga saat ini tidak ada upaya yang berarti yang dilakukan pasca pertemuan aktivis dengan Presiden Jokowi tersebut.

Dalam memahami konflik ini, (Radikal Lukafiardi, 2022) yang juga dikutip dalam penelitian (Sholahudin Al Ayubi, 2023) menilai terdapat latar ekonomi politik yang kuat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang secara umum cenderung didominasi oleh keterlibatan dan afiliasi pelaku usaha dalam politik dan kebijakan sehingga membuat Indonesia terus menerus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif.

Dengan kata lain, kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatur industri kemungkinan diakibatkan karena kuatnya pengaruh kekuasaan kelompok tertentu yang tidak menghendaki perubahan arah kebijakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan yang selama ini mereka peroleh. Dalam ilmu politik, kelompok ini umumnya dikenal sebagai oligarki.

Berdasarkan fenomena pada konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL khususnya pada cara-cara perusahaan mempengaruhi Negara dan bagaimana oligarki yang kuat memanipulasi politisi, membentuk institusi, dan mengendalikan media untuk melindungi PT TPL dengan mengorbankan kepentingan sosial disebut dengan *state capture*. Pendahulu dari gagasan *state capture* ini adalah *regulatory capture*, yang menggambarkan situasi dimana otoritas publik, dalam kapasitasnya regulator aktivitas ekonomi, khususnya memungkinkan kepentingan kelompok yang mampu mempengaruhinya untuk menang atas kepentingan publik (Capussela, 2021). Penelitian empiris tentang *state capture* telah menunjukkan hubungan antara koneksi politik suatu perusahaan dengan kebijakan publik dalam demokrasi. Di Italia misalnya, koneksi politik telah terbukti mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman oleh bank-bank yang dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah (Marandici, 2017).

Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jaringan politik yang dimiliki oleh PT TPL dengan pemerintah terpilih telah memperkuat eksistensi perusahaan hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor; Pertama, modalitas politik dan ekonomi. Oligarki Toba Pulp Lestari memiliki pengaruh yang kuat terhadap rezim. Sukanto Tanoto yang merupakan pemilik Toba Pulp Lestari melalui Royal Golden Eagle (RGE) juga menjadi penyokong proyek pembangunan di IKN dengan nilai Rp 2 triliun. Tak hanya itu, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur adalah lahan milik Sukanto Tanoto. Ia juga menjadi pengusaha yang telah banyak memberikan dukungan dana terhadap rezim Jokowi. Dukungan politik dan ekonomi oleh oligarki Toba Pulp Lestari terhadap rezim yang membuat pengaruhnya semakin kuat, bahkan kelompok Sukanto Tanoto mengintervensi kebijakan pemerintah di setiap rezim pemerintahan dari era Soeharto hingga Presiden Jokowi, sehingga memunculkan ketergantungan pemerintah terhadap kelompok Sukanto Tanoto.

Kedua, pengaruh internasional. Indorayon yang sekarang PT Toba Pulp Lestari memiliki jaringan internasional yang kuat. Kepemilikan awalnya perusahaan ini terdiri dari Sukanto Tanoto (RGM), perusahaan asal Kanada dan Korea Selatan, serta salah satu putra presiden Soeharto. Pada era 2000-an, perusahaan ini memenangkan gugatan internasional karena pabriknya ditutup oleh Presiden Habibie dan Abdurahman Wahid. Akhirnya, pemerintah Indonesia kalah dalam arbitrase internasional di Washington sehingga memberi 'lampu hijau' bagi pabrik untuk kembali beroperasi pada Mei 2000. Bahkan, pada awal tahun 2024, salah satu perusahaan milik Tanoto, Pacific Eagle Real Estate membeli hotel mewah di China bernama Wanda Reign on the Bund dengan harga yang ditaksir mencapai Rp3,7 triliun. Sebelumnya, perusahaan ini juga membeli pusat perbelanjaan di Singapura dan membangun menara perkantoran di Beijing, China. Karir bisnis Tanoto ini yang membuat ia berpengaruh di dunia internasional.

Ketiga, modalitas sosial. *Corporate social responsibility* perusahaan Tanoto melalui Tanoto Foundation aktif mendukung pendidikan di Indonesia. Baik melalui program beasiswa yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga

universitas-universitas hingga program-program dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu, Tanoto dan PT Toba Pulp Lestari juga aktif melakukan hegemoni wacana melalui media. Kampanye Tanoto dan PT Toba Pulp Lestari yang menampilkan bahwa perusahaannya humanis, membela hak asasi manusia dan lingkungan hidup adalah salah satu cara mereka untuk *counter* narasi dan memanipulasi persepsi publik.

Tiga faktor tersebut adalah faktor penting dalam memahami secara riil bagaimana pengaruh oligarki dalam sistem politik di Indonesia. Kajian Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2004) menjelaskan bahwa dominasi oligarki di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Menurutnya, justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang terutama di dorong oleh perkembangan neoliberalisme. Masa reformasi menjadi peluang bagi pertukaran kepentingan dan kehadiran politisi baru, beberapa berasal dari oligarki dan elit rezim lama yang kini harus bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam arena politik seperti parlemen, partai politik dan pemilihan umum. Hipotesis utama Richard Robinson dan Verdi R. Hadiz (2004) bahwa sampai pada taraf tertentu bahkan kekuatan-kekuatan yang hegemonik di bawah Soeharto mampu bertahan dan mengakomodasi benturan-benturan dengan pasar global serta krisis ekonomi berturut-turut selama empat dekade. Lebih khusus lagi, mereka sebagian besar telah bertahan dari keruntuhan rezim Soeharto dan pengaturan politik otoriter yang sangat tersentralisasi di mana kekuasaan dan kekayaan telah diinkubasi dan dialokasikan sampai sekarang. Fenomena ini disebut dengan reorganisasi oligarki Orde Baru ke reformasi. Runtuhnya rezim Soeharto telah memunculkan ketidakpastian kapitalisme yang "liar" atau "ganas" dan reorganisasi oligarki akibat kompetisi politik yang terbuka (Hadiz, 2004). Hal ini yang membuat perubahan PT Inti Indorayon Utama (IIU) ke PT TPL yang bukan hanya sekedar perubahan nama, melainkan juga disertai dengan perubahan strategi pertahanan Oligarki Tanoto secara politik.

Pertanyaan penting yang melandasi penelitian ini adalah bagaimana dominasi oligarki dan *state capture* dalam konflik antara Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba dengan PT Toba Pulp Lestari? Dalam banyak kasus sejak tahun 1986 hingga saat ini, konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat dengan PT TPL sering kali melibatkan struktur negara dalam mengamankan sumber daya PT TPL. Problem ini mempengaruhi pertanyaan selanjutnya apakah terdapat pengaruh oligarki dalam pemerintahan pada konflik Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari? Merujuk pada basis teoritis oligarki dan *state capture*, dapat dikatakan bahwa berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia saat ini juga diiringi dengan tren semakin menguatnya dominasi oligarki sehingga keberadaannya sulit dilepaskan dari berbagai isu kebijakan pemerintah. Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat korelasi yang kuat antara pengaruh oligarki dengan ketergantungan pemerintah terhadap industri.

Lanskap sistem ekonomi-politik PT TPL secara umum cenderung dipengaruhi oleh kekuasaan antara afiliasi elit dengan oligarki dalam sistem politik. Penelitian ini ditujukan untuk memahami lebih jauh bagaimana dominasi oligarki dan *state capture* yang terjadi melalui studi kasus konflik antara Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba dengan PT TPL tahun 2014 - 2024. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pola strategi *oligarchic state capture* Tanoto dalam upaya

mempertahankan kekayaan dan memperkuat pengaruhnya terhadap pemerintahan. Penelitian ini akan memotret upaya *oligarchic state capture* Tanoto mempertahankan dominasi penguasaan sumber daya alam di kawasan danau Toba dan menggunakan kekuasaan koersif untuk melakukan penertiban kepada Masyarakat Adat yang melakukan perlawanan terhadap PT Toba Pulp Lestari.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pendefinisian Jeffrey Winters dalam bukunya berjudul *oligarchy* menyebutkan bahwa tokoh-tokoh dari semua golongan yang memegang kekuasaan yang berlebihan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan disebut oligarki (Winters, 2011). Elemen kekayaan sumber daya secara umum diakui sebagai syarat penting oligarki. Oligarki berbeda dari semua kelompok karena basis kekuasaan mereka. Kekayaan pribadi yang sangat besar merupakan bentuk ekstrem dari ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan politik. Faktanya, kekayaan besar di tangan minoritas menciptakan keuntungan kekuasaan yang signifikan dalam ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Kita cenderung mengabaikan analisis politik selama berabad-abad yang mengeksplorasi hubungan erat antara kekayaan dan kekuasaan. Pada tahun 1878, de Laveleye menulis bahwa para filsuf dan legislator zaman kuno mengetahui betul, melalui pengalaman, bahwa kebebasan dan kesetaraan politik hanya dapat ada ketika didukung oleh kesetaraan kondisi (Tsai, 2007). Hubungan dasar yang sama antara kekuatan material dan politik digaungkan juga oleh Robert Dahl (1985), yang merujuk pada baron perampok kaya yang muncul di Amerika Serikat pada paruh kedua abad kesembilan belas sebagai sekelompok warga negara yang sangat tidak setara dalam sumber daya yang dapat mereka bawa ke kehidupan politik (Dahl, 1985). Klaim sederhananya adalah bahwa distribusi sumber daya material di antara anggota komunitas politik, demokratis atau lainnya, memiliki pengaruh yang mendalam pada kekuatan relatif. Semakin tidak merata distribusinya, semakin dibesar-besarkan kekuasaan dan pengaruh individu yang kaya dan semakin intens kesenjangan material itu sendiri mewarnai motif dan tujuan politik mereka. Studi tentang oligarki berpusat pada kekuasaan kekayaan dan politik spesifik yang melingkupi kekuasaan (Ramseyer J., 1995).

Dalam penjabaran di atas yang dimaksud oleh oligarki adalah aktor yang memiliki pengaruh untuk mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusif mereka. Oligarki selalu merupakan individu, bukan korporasi atau kelompok lain. Hal ini yang membedakan oligarki dengan elit dan bentuk-bentuk dominasi minoritas lainnya (Oscar Bulaong Jr., 2022). Bagaimana keterlibatan oligarki dalam politik? Keterlibatan politik langsung oligarki sangat dimediasi oleh rezim kepemilikan masyarakat yang terstratifikasi. Semakin besar kebutuhan oligarki untuk mempertahankan kepemilikan mereka secara langsung, semakin besar kemungkinan oligarki akan mengambil alih kontrol pemerintahan langsung dengan sumber daya dan peran kekuasaan lainnya (Winters, 2011).

Kompleksitas konflik antara Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba dengan PT TPL tidak dapat hanya dijelaskan hanya pada satu variabel. Bahwa konflik tersebut disebabkan oleh akumulasi sejarah dominasi oligarki dalam penguasaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan teori oligarki dan *state capture* sebagai pisau analisis untuk memahami kompleksitas konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL. *State capture*

menurut Stinger (1971) diartikan sebagai kondisi dimana kepentingan pribadi kelompok tertentu secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri (Joel S. Hellman., 2000). Fenomena ini umumnya banyak ditemui pada industri ekstraktif di negara-negara berkembang. Sementara oligarki, saya mengikuti definisi netral Winters tentang oligarki sebagai aktor yang memimpin dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan pengaruh sosial mereka. Dua konsep ini (*state capture* dan oligarki) sebetulnya memiliki keterkaitan yang erat - bagaimana segelintir kelompok dapat mempengaruhi dan mengendalikan struktur dan sumber daya dengan modal politik, ekonomi dan sosialnya. Untuk menjembatani dua perbedaan ini, (Marandici, 2021) dalam jurnalnya menyebut dengan *oligarchic state capture* atau konsep penguasaan negara oleh oligarki yang merujuk pada situasi di mana konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di tangan sekelompok kecil orang yang menggunakan pengaruh mereka terhadap parlemen, pemerintah, partai politik, administrasi negara, kepolisian, peradilan dan media.

Perspektif yang berpusat pada negara yang dianut dalam teori ini menekankan otonomi negara sebagai syarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk keberhasilan demokrasi. Negara dipahami dalam istilah Weberian sebagai organisasi politik yang memegang monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dan bergantung pada aparat birokrasi agar berfungsi secara efektif. Menurut Skocpol, negara dapat dianggap berpotensi otonom jika mereka merumuskan dan mengejar tujuan yang tidak hanya mencerminkan tuntutan atau kepentingan kelompok sosial, kelas, atau masyarakat (Skocpol, 2010). Berdasarkan wawasan ini, penguasaan negara oleh oligarki didefinisikan sebagai dominasi sementara atas negara oleh satu atau beberapa jaringan oligarki.

Oligarchic state capture berbeda dengan korupsi, karena oligarki jarang menyuap untuk mendapatkan jabatan politik. Selain itu, keterlibatan para pembesar bisnis dalam politik tidak selalu ilegal atau kriminal, meskipun korupsi, seperti yang dicatat oleh Hellman, merupakan strategi umum untuk memberikan pengaruh terhadap negara (Joel S. Hellman., 2000). Cara lain untuk mempengaruhi negara termasuk kontrol atas partai politik, klientelisme, kepemilikan media, menjadi pejabat tinggi, melobi kekuatan Barat, dan mengendalikan hukum. Dalam konteks PT TPL, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh PT TPL dengan pemerintah terpilih telah memperkuat eksistensi perusahaan hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yakni modal politik, ekonomi dan sosial yang digerakkan untuk mempengaruhi kekuasaan. Studi ini berangkat dari pendekatan yang ada dengan menunjukkan bahwa selain mempertahankan kekayaan, oligarki juga memaksimalkan kekuasaan dan ekstraksi sumber daya.

Jaringan oligarki bersifat kompleks dan disatukan dengan kepentingan ekonomi-politik yang sama. Oligarki pun jarang bertindak sendiri dalam politik. Mereka membina sekutu, membangun jaringan patronase seperti yang diidentifikasi oleh Henry Hale di seluruh Eurasia dan berfungsi sebagai poros negara mafia seperti yang dianalisis oleh Balint Magyar di Hongaria. (Hale, 2015) dalam bukunya berjudul *Politik Patronal: Dinamika Rezim Eurasia dalam Perspektif Komparatif* mengatakan bahwa jaringan

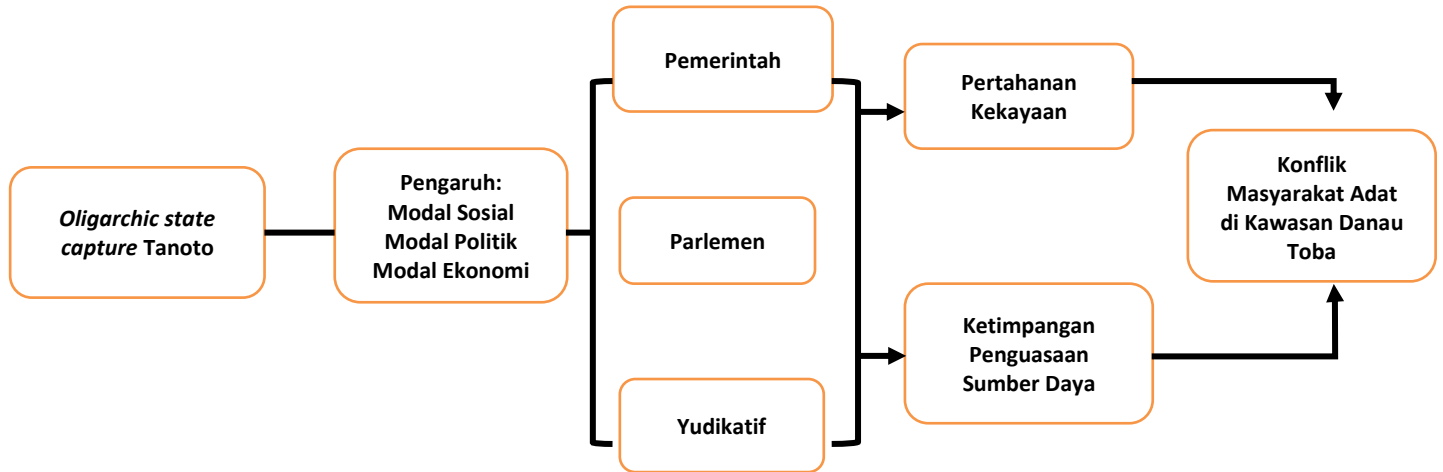
oligarki tidak transparan, terkadang mencakup unsur kriminal, kerabat, dan perusahaan cangkang, yang terlibat dalam eksploitasi negara di luar pengawasan publik. Keterlibatan politik semacam itu lebih banyak tentang ekstraksi sumber daya dari negara-negara yang lemah daripada pertahanan kekayaan. Para oligarki yang berhasil menduduki jabatan politik teratas tidak hanya terlibat dalam pertahanan kekayaan, tetapi juga merumuskan kebijakan nasional.

Menurut data Forbes 2023, Sukanto Tanoto menempati urutan ke-20 orang terkaya dengan total kekayaan US\$ 3,15 Miliar atau sekitar Rp 48 triliun (Forbes, 2023). Dirangkum dari berbagai sumber, taipan satu ini menguasai lahan yang sangat luas di Indonesia di bawah induk korporasi Royal Golden Eagle (RGE), misalnya 48 ribu hektar lahan di daerah Ibu Kota Baru yang merupakan konsesi PT ITCI Hutan Manunggal (IHM) Kalimantan Timur dan sekitar 980.000 hektar konsesi hutan kayu perusahaan pulp dan kertas Asia Pasific Resources International Limited. Dengan modal ekonomi yang besar, Sukanto Tanoto memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap pemerintahan di Indonesia. Pada akhir tahun 1983, saat Sukanto Tanoto mendirikan PT Inti Indorayon Utama, ia melibatkan salah seorang anak Presiden Soeharto yakni Tommy Soeharto untuk menjadi salah satu komisaris dalam perusahaannya. Ini adalah cara Sukanto Tanoto upaya memperkuat sekutu dan jaringan politiknya dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Soeharto. Bahkan pada era Soeharto, penetapan izin konsesi Indorayon lebih dahulu dari pada penetapan kawasan hutan Negara, yang artinya Indorayon dapat dengan bebas menentukan luasan izin konsesinya tanpa terhalang tumpang tindih kawasan hutan.

Tak hanya itu, sepanjang rezim Jokowi (2014-2024), Sukanto Tanoto dan TPL memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerintahan. Koalisi Forum Pajak Berkeadilan tahun 2020 mengungkap bahwa kerugian potensi pajak yang di derita pemerintah mencapai Rp 1.07 triliun tetapi TPL hanya membayar pajak US\$ 15 juta. Menurut Majalah Tempo edisi 6 Februari 2021, TPL diduga memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke China untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri (Tempo, 2021). Selain itu, Tanoto membeli gedung Ludwigstrasse 21 di Munchen, Jerman, seharga Rp 6 triliun tetapi tidak tercatat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sehingga diduga menggunakan perusahaan cangkang untuk menghindari otoritas pajak di Jerman dan Indonesia. Sukanto Tanoto melenggang bebas mendulang kekayaannya dan tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Ketergantungan negara pada oligarki adalah hal yang gagal dihindari oleh beberapa negara yang sedang mengalami demokrasi. Dalam keadaan seperti itu, negara tetap tidak mampu menjalankan kebijakan yang merugikan kepentingan material oligarki, yang mengendalikan perangkat koersif negara dan dapat dengan mudah menggagalkan demokratisasi dengan mengejar pengayaan diri.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran *Oligarchic State Capture* Dalam Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL di Kawasan Danau Toba



Pada kerangka pemikiran di atas, penulis menggunakan terminologi *oligarchic state capture* untuk menggambarkan bagaimana oligarki mendominasi pemerintah, parlemen dan lembaga yudikatif menggunakan pengaruhnya melalui modal sosial, politik dan ekonomi untuk mempertahankan kekayaannya. Dominasi sumber daya tersebut yang memicu ketimpangan penguasaan sumber daya dan berujung pada konflik. Hal ini yang membedakan dengan teori-teori yang berkaitan dengan oligarki. Menurut Jeffrey Winters, oligarki didefinisikan oleh kekuatan material yang terkonsentrasi berdasarkan klaim atau hak yang dipaksakan atas kepemilikan dan kekayaan. Sementara demokrasi mengacu pada kekuatan politik formal yang tersebar berdasarkan hak, prosedur, dan tingkat partisipasi rakyat. Inilah sebabnya mengapa demokrasi dan oligarki sangat cocok asalkan kedua wilayah kekuasaan tersebut tidak berbenturan. Namun, apa yang membedakan antara oligarki dan *oligarchic state capture*? Dengan merujuk pada definisi Jeffrey Winters bahwa fokus oligarki adalah mempertahankan kekayaannya melalui berbagai cara. Namun, ketika dua wilayah kekuasaan - antara Negara dan oligarki saling berseberangan, maka kecenderungan oligarki yang dapat dijinakkan dan dikendalikan oleh Negara sangat mungkin terjadi. Berbeda dengan *oligarchic state capture* yang dapat mengendalikan pemerintahan demokratis melalui modal sosial, politik dan ekonomi yang dimilikinya untuk mempertahankan dan memperbanyak kekayaannya.

METODOLOGI

Penelitian oligarki dan praktik *state capture* dalam konflik antara Masyarakat Adat dengan PT TPL di Kawasan Danau Toba menggunakan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain kajian menggunakan kasus tunggal dengan multi-analisis agar terfokus pada masalah atau kekhawatiran dan kemudian menyeleksi satu kasus serta dibatasi untuk membedah kasus yang sudah ditentukan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Cresswell (2017) bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem terikat atau beragam kasus dari waktu ke waktu

melalui pengumpulan data mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini ditentukan oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas dari suatu individu (Creswell, 2018). Dalam hal lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan institusi atau kelompok sosial serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Selanjutnya menurut Creswell, studi kasus seperti halnya etnografi dalam menganalisis terdiri dari deskripsi rinci tentang kasus beserta setting-nya (Creswell, 2018).

Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasus. Terlebih lagi untuk setting kasus yang unik, hendaknya menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan sebagaimana setting yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk menunjang setting penelitian tersebut ada empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam pendekatan studi kasus yaitu, pertama, pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; kedua, interpretasi langsung.

Untuk membedah konflik antara Masyarakat Adat dan PT TPL serta mengidentifikasi pola strategi *oligarchic state capture* dalam konflik tersebut penulis menggunakan kasus tunggal dengan multi-analisis agar berfokus pada masalah dan kemudian menyeleksi satu kasus yang sudah peneliti tentukan yakni dominasi oligarki dan praktik *state capture* dalam konflik Masyarakat Adat dan PT TPL.

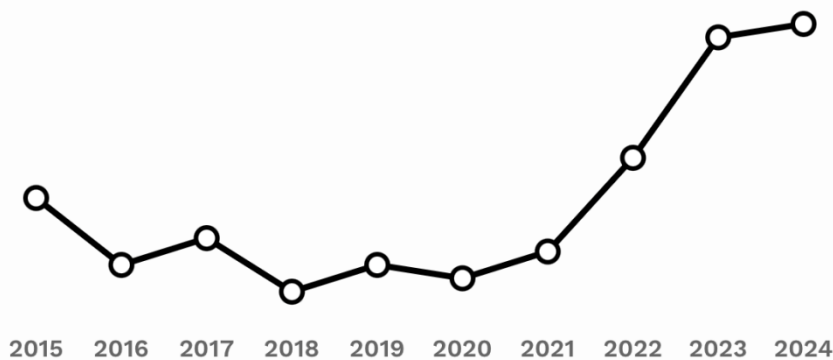
HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsentrasi Kekayaan dan Gurita Bisnis Tanoto

Menggunakan perspektif oligarki Winters, penelitian ini mengkategorikan Sukanto Tanoto sebagai oligarki yang memiliki pengaruh yang kuat dengan kekayaan yang dominan. Berdasarkan *tracking* kekayaannya, ditemukan begitu banyak konsentrasi basis material yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Pada tahun 1972, Sukanto Tanoto memulai karirnya sebagai pebisnis pengeksport kayu log ke Jepang dan Taiwan untuk diolah menjadi *plywood*, sebelum diimpor dengan harga yang mahal. Tanoto melihat peluang strategis itu untuk membangun sendiri pabrik pengolahan kayu di Indonesia. Mendapat bantuan dari mantan Jenderal TNI, Tanoto membangun pabrik pengolahan kayu dan diresmikan oleh Presiden Soeharto dan mulai beroperasi pada tahun 1975. Ini awal mula kedekatan Sukanto Tanoto dengan Presiden Soeharto. Hingga pada tahun 1989, Sukanto Tanoto memulai pabrik pulp di bawah nama PT Inti Indorayon Utama, yang dibangun di sebuah desa Sosor Ladang Kecamatan Porsea, Danau Toba Sumatera Utara. Namun pabrik ini tidak berjalan lancar karena konflik dengan penduduk setempat, yang berpendapat bahwa Indorayon mencemari daerah, melakukan deforestasi besar-besaran dan sengketa tanah. Akibat konflik berkepanjangan, pabrik ini sempat ditutup pada tahun 1999 dan kemudian kembali memperoleh izin dan telah beroperasi secara penuh setelah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), meski perlawanan dari masyarakat yang terdampak masih terus berlanjut.

Berdasarkan data terakhir Forbes, Sukanto Tanoto tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar US\$3,1 miliar atau sekitar Rp 50,27 triliun hasil dari kepemilikannya di Royal Golden Eagle, konglomerat terdiversifikasi dengan aset lebih dari US\$35 miliar di industri pulp dan kertas, minyak sawit, dan energi, yang mempekerjakan 70.000 orang di seluruh dunia (Forbes, 2023).

Gambar I. Riwayat Kekayaan Sukanto Tanoto Tahun 2015 - 2024



Sumber: Data Forbes (2024)

Data Forbes di atas menunjukkan peningkatan kekayaan Sukanto Tanoto secara signifikan selama hampir satu dekade belakangan. Pada tahun 2015, Sukanto Tanoto tercatat memiliki kekayaan sebanyak USD\$1,8 miliar. Pada tahun ini, paket regulasi yang diterbitkan pemerintah kian memupuk optimisme pihak Tanoto untuk menjalankan bisnis. Perusahaan tak ragu berekspansi, bahkan anak usaha Royal Golden Eagle Group menyiapkan dana senilai US\$1 miliar untuk membangun *paper machine* dan pabrik serat rayon. Selanjutnya, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 kekayaan Sukanto Tanoto mengalami penurunan di rata-rata USD\$1,3 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah Pandemi Covid-19 dan situasi global yang tak menentu. Dan, mulai dari tahun 2021, kekayaan Sukanto Tanoto meningkat secara signifikan mencapai USD\$3,1 miliar pada tahun 2024 yang beriringan dengan ekspansi bisnis Sukanto Tanoto yang semakin meluas.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Sukanto Tanoto

PROFILE	DAFTAR PERUSAHAAN	DESKRIPSI
Sukanto Tanoto Sukanto Tanoto lahir di Tan Kang Hoo, 25 Desember 1949 dan tinggal di Medan dan Singapura. Ia merupakan pengusaha Indonesia yang memulai usaha di industri pengolahan	Asia Pacific Resources International Holding Ltd. (APRIL)	Salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia. Pulp yang diproduksi APRIL digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk tisu dan kertas, sedangkan kertas untuk keperluan percetakan yang banyak dibutuhkan oleh jutaan orang setiap harinya.
	Asia Symbol	Produsen pulp dan kertas terkemuka dunia yang berbasis di

<p>kayu. Pada tahun 2013, ia adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan nilai aset 2,3 miliar dollar.</p>		<p>China. Asia Symbol menggunakan serat terbarukan dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 2 juta ton pulp, 1 juta ton kertas, dan 530 ribu ton kertas karton.</p>
	Asian Agri	<p>Salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia dengan kapasitas produksi tahunan hingga 1 juta ton. Minyak sawit adalah produk serbaguna dan Asian Agri percaya bahwa minyak sawit harus diproduksi secara berkelanjutan sesuai dengan keberlangsungan ekonomi, sosial, dan lingkungan.</p>
	Apical Group Ltd	<p>Salah satu pengelola dan pengeksport minyak sawit dan produk turunannya seperti makanan, oleokimia, dan biodiesel terbesar di Indonesia untuk keperluan domestik dan ekspor internasional.</p>
	Bracell	<p>Pemain global terkemuka di bidang <i>dissolving pulp</i> dan selulosa khusus. Kegiatan produksi Bracell didukung oleh sumber daya perkebunan <i>eucalyptus</i> yang berkelanjutan dan pabrik berteknologi tinggi.</p>
	Sateri	<p>Produsen terbesar dunia di bidang serat <i>viscose-rayon</i>, yakni serat alami yang mudah terurai. Biasanya terdapat pada produk sehari-hari seperti tekstil, tisu basah, serta produk-produk perawatan diri.</p>
	Asia Pacific Rayon (APR)	<p>Produsen <i>viscose</i> rayon terintegrasi pertama di Asia mulai dari perkebunan hingga produk serat <i>viscose</i>. Pabriknya berkapasitas 240.000 ton, terletak di Pangkalan Kerinci bersama dengan APRIL</p>
	Pacific Energy	<p>Sebelumnya bernama Pacific Oil dan Gas (PO&G). Perusahaan pengembangan sumber daya energi independen ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan</p>

		energi yang terus meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Asia.
--	--	---

Sumber: *diolah* penulis (2024)

Tabel di atas belum dapat menjelaskan secara keseluruhan daftar perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Sebab, masih banyak investasi Tanoto di luar negeri maupun dalam negeri seperti membeli mal super mewah di Singapura seharga \$868 juta atau sekitar Rp9,4 triliun. Hal ini dibahas oleh Forbes pada Februari 2022 lalu. Selain itu juga melalui *Pacific Eagle Real Estate*, Sukanto Tanoto membeli Tanglin Shopping Centre di kawasan perbelanjaan Orchard Road Singapura hingga pada investasi Tanoto di IKN dalam rangka membantu pemerintah.

Dari sekian banyak bisnis Tanoto, terlihat bahwa yang paling dominan adalah pada sektor perkebunan. Usaha ini pula yang mengantarkan Tanoto menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tanoto beserta gurita bisnisnya pada sektor perkebunan tampil seolah mendominasi sektor-sektor strategis.

Menurut Robinson-Hadz, kepentingan utama para oligarki adalah selalu mementingkan jaringan kelompok mereka sendiri melalui penguasaan terhadap berbagai sarana/institusi publik. Dominasi pada sektor perkebunan tersebut memicu berbagai konflik yang terjadi, termasuk dengan perjalanan PT Inti Indorayon Utama milik Tanoto hingga berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari yang memicu berbagai perlawanan Masyarakat Adat. Hal ini semakin menguatkan argumentasi Harrington bahwa dimana ada ketidaksetaraan harta benda pasti ada ketidaksetaraan kekuasaan - dimana oligarki tampil dominatif, sementara pihak yang dikuasai seolah tak berdaya melawan dominasi tersebut.

Dominasi Tanoto Group dan Pengaruhnya Pasca Orde Baru

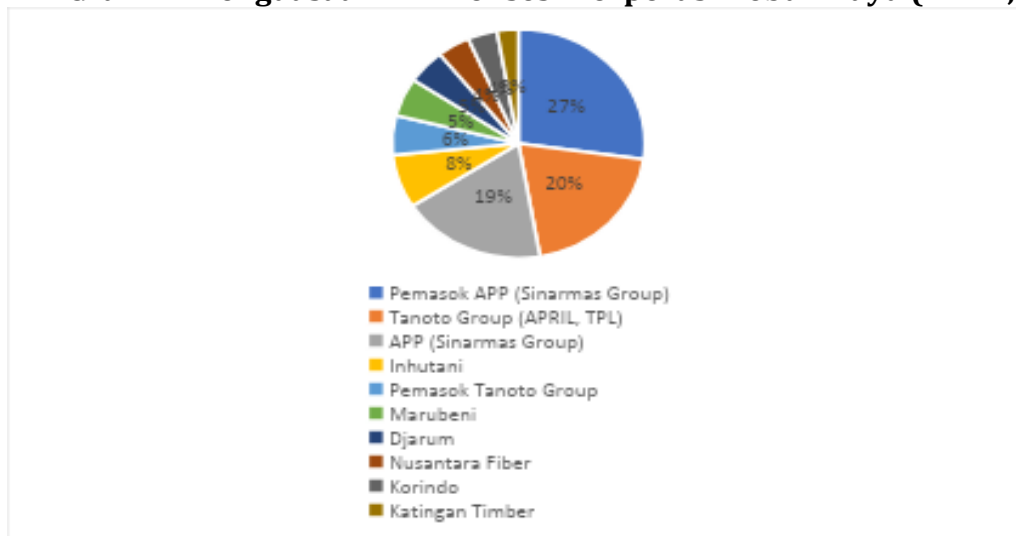
Sejak awal berdirinya, PT TPL yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama tidak berjalan lancar karena konflik dengan Masyarakat Adat. Konflik tersebut berkaitan dengan dampak eksploitasi yang mencemari daerah dan terjadi deforestasi besar-besaran hingga pada sengketa tanah. Selama pemerintahan Soeharto, Indorayon bebas melakukan eksplorasi karena hubungan dekat antara Sukanto Tanoto sebagai pemilik dengan Soeharto. Demonstrasi penolakan pun tak digubris oleh pemerintah dan gagal menghentikan kegiatan pabrik. Jatuhnya Soeharto, tekanan publik makin keras, namun gerakan protes tersebut selalu dilindungi oleh aparat keamanan yang disewa oleh perusahaan. Gerakan protes berujung pada bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan sehingga mengakibatkan enam orang tewas dan ratusan luka-luka pada tahun 1999. Akibatnya, Presiden Habibie menutup sementara aktivitas perusahaan dan dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perusahaan ini kembali memperoleh izin dan telah beroperasi secara penuh dengan berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari.

Undang-Undang Kehutanan (UU 41/1999) yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, namun oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu 1/2004) sehingga perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka di dalam hutan lindung. Berbasis Perppu ini Megawati kemudian menerbitkan Keppres 41/2004 yang membolehkan 13 korporasi melakukan eksplorasi di dalam hutan lindung, termasuk PT TPL.

Selama era pemerintahan Presiden Megawati hingga Presiden Jokowi, Sukanto Tanoto diuntungkan dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari bertambahnya areal penguasaan izin konsesi TPL. Berdasarkan UU Kehutanan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, bahwa TPL sesungguhnya memiliki 141.537 hektar area konsesi illegal karena berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL). Namun, pasca disahkannya UU Cipta Kerja, pelanggaran berat oleh TPL ini justru lolos secara hukum. Sebab, dalam UU Cipta Kerja telah mengubah aturan dimana Hutan Produksi Terbatas (HPT) digabungkan dengan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan kata lain, luas TPL menjadi bertambah secara legal (KPA, 2021). Selain itu, sebagaimana yang dituliskan dalam artikel majalah Tempo, terdapat dugaan transaksi mencurigakan PT TPL yang ditemukan oleh Tim Indonesia *Leaks* pada akhir 2018 lalu bahwa dalam rentang waktu 2006 - 2017, perusahaan yang dahulu bernama Indorayon tersebut telah melakukan manipulasi dokumen pencatatan ekspor di bea cukai untuk menghindari beban pajak, angkanya pun mencapai ratusan miliar rupiah (Tempo, 2021).

Temuan Walhi (2022) menunjukkan bahwa pemerintah membolehkan pendirian pabrik *pulp & paper* baru tanpa kejelasan sumber bahan bakunya sehingga terjadi *overcapacity* luar biasa; dan bahkan hutan alam pun dibolehkan dihabisi untuk diganti dengan kebun kayu. Penambahan luas alokasi kebun kayu, dari 30.000 ribu hektare pada 1990 menjadi 4,4 juta hektare pada 1999 dan bahkan melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 11,3 juta hektare pada 2021 (Walhi, 2022).

Grafik 2. Penguasaan Izin Konsesi Korporasi Kebun Kayu (KLHK, 2022)

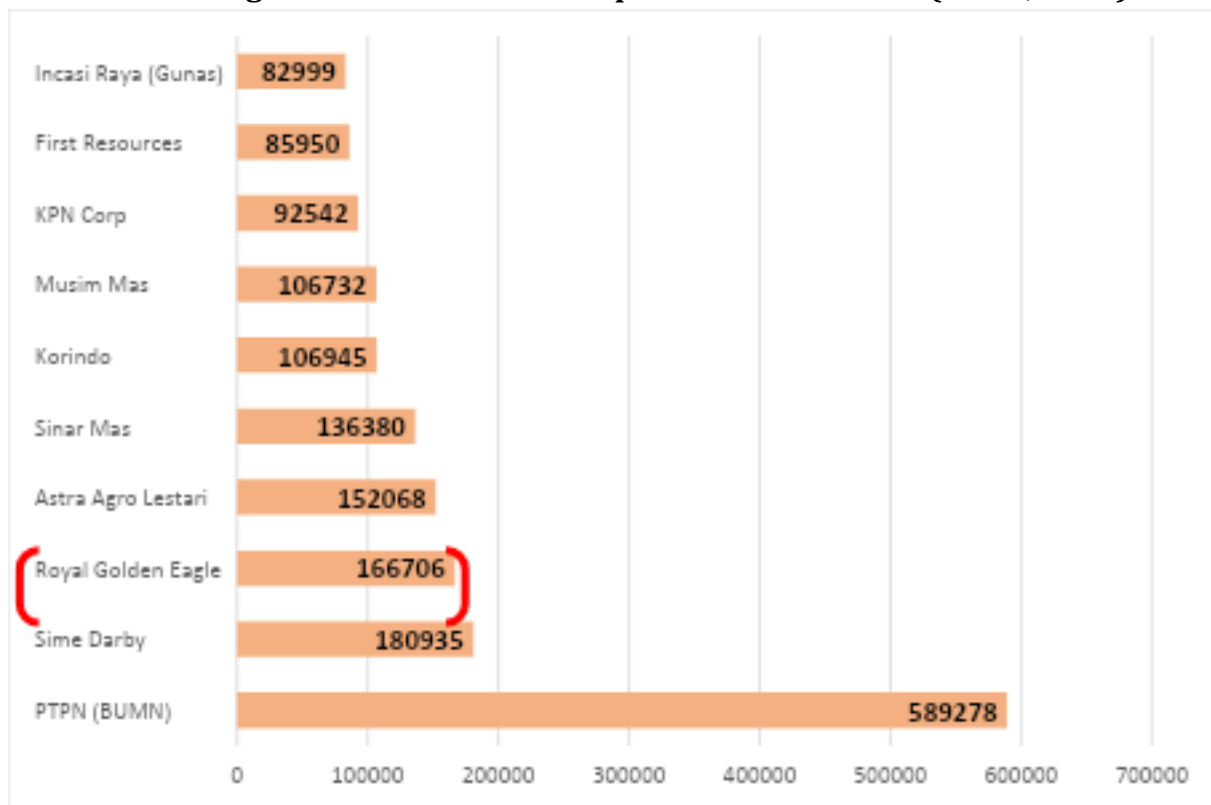


Sumber: Data KLHK (2022)

Pada bagan di atas terlihat bahwa Tanoto Group (APRIL, TPL) masuk dalam sepuluh teratas korporasi kebun kayu yang menguasai hampir 50% alokasi izin kebun kayu di Indonesia. Tanoto Group menguasai 20% konsesi dari 11,3 juta hektare pada 2021 atau sekitar 1.144.455 hektare izin konsesi ditambah dengan pemasok Tanoto Group seluas 316.651. Sebagian pemasok seperti (TPL, APRIL, RGE, dll) ini menurut Laporan Koalisi Anti Mafia Hutan (2018) diduga terafiliasi atau dimiliki oleh Tanoto Group.

Selain itu secara regulasi, dimungkinkan pengubahan kawasan hutan menjadi peruntukan non-kehutanan, yang bila dikeluarkan dari kawasan hutan disebut sebagai pelepasan kawasan hutan. Ditelisik lebih dalam, pembangunan kebun sawit merupakan porsi terbesar dalam pelepasan kawasan hutan selama ini. Tercatat seluas 6 juta hektare pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, atau 71% dari seluruh pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit ini sepenuhnya untuk korporasi (KLHK, 2022).

Grafik 2. Penguasaan Izin Konsesi Grup Usaha Kebun Sawit (KLHK, 2022)



Sumber: Data KLHK (2022)

Royal Golden Eagle (RGE) sebagai grup usaha milik Tanoto merupakan sepuluh besar grup usaha yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan. Kesepuluh korporasi ini

menikmati 29% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Dalam hal ini RGE menguasai 166.706 hektare pada 2022 areal konsesi untuk perkebunan sawit.

Tabel 2. Pengaruh Tanoto Group Dalam Rezim

No	Rezim	Kedekatan dan Kontribusi
1	Presiden Soeharto	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Indorayon dibantu oleh Soeharto. • Cendana yang diwakili oleh Tommy Soeharto mengantongi saham kosong sebesar 5% di Indorayon • Pada masa pemerintahan Soeharto, Indorayon menikmati kebebasan melakukan eksploitasi • Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie, dengan persetujuan Presiden Soeharto memaksakan pendirian pabrik Indorayon di Sosorladang
2	Presiden BJ Habibie	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden BJ Habibie tersandera dengan Indorayon antara ingin menutup karena gelombang protes makin besar bahkan memakan korban, disisi lain dalam kabinet masa reformasi juga terbelah (pro dan kontra) dengan rencana penutupan Indorayon • Pada 19 Maret 1999, Presiden Habibie memberikan keputusan lisan menghentikan seluruh proses produksi PT IIU. • Lahirnya dua kebijakan; satu sisi memberikan keputusan lisan menutup Indorayon, sisi lain membiarkan Indorayon beroperasi. • Pada 21 Juli 1999, keputusan pemerintah, yang disiapkan di Sekretariat Negara dari hasil keputusan lisan Presiden Habibie 19 Maret 1999 untuk men-taman-nasionalkan kawasan Danau Toba lalu menutup PT IIU, dibatalkan. Yang terjadi justru rencana untuk memberikan kesempatan audit kepada auditor Internasional dan profesional.
3	Presiden Abdurrahman Wahid	<ul style="list-style-type: none"> • Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid mengalami perpecahan menyikapi konflik PT IIU. Menteri Negara Lingkungan Hidup berbeda pendapat dengan Menperindag dan Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Sampai akhirnya Presiden mengusulkan untuk membawa persoalan ini ke badan Arbitrase Internasional. Karena mendapat berbagai tanggapan dan tantangan, usul ini pun akhirnya tidak dijalankan. • Tiga fase kebijakan: (1). Meneg Lingkungan Hidup, Sonny Keraf mengeluarkan keputusan menghentikan proses produksi PT IIU; (2) Menperindag Jusuf Kalla yang kemudian

		diganti dengan Luhut Panjaitan membuka kembali aktivitas pabrik PT IIU yang berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari; (3) Hasil sidang kabinet meminta PT IIU untuk mengubah gaya manajemennya yang kemudian berkonsekuensi terhadap perubahan nama ke PT Toba Pulp Lestari
4	Presiden Megawati Soekarno Putri	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keraguan apalagi perpecahan di kalangan menteri kabinet untuk membuka PT TPL dengan paradigma barunya. Empat menteri mengeluarkan SK bersama dalam rangka pembukaan-kembali PT IIU/TPL.
5	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	<ul style="list-style-type: none"> • AMAN mencatat sejak 2004 hingga 2014 konflik antara Masyarakat Adat dengan PT TPL terus terjadi, bahkan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sempat menyurati Presiden SBY menyampaikan soal konflik ini namun tak digubris.
6	Presiden Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> • PT TPL masih dengan bebas melakukan eksploitasi. Bahkan luasan izin konsesi mereka semakin bertambah. Melalui SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 membuat luas areal kerja TPL bertambah. • Sukanto Tanoto melalui RGE mengucurkan investasi di Ibu Kota Nusantara untuk proyek pembangunan sebanyak Rp 2 Triliun

Sumber: *diolah* penulis (2024)

Menurut Stuch (2015:2) praktik *state capture* dapat diartikan sebagai tindakan individu atau kelompok baik di sektor publik maupun swasta yang mempengaruhi pembentukan undang-undang, peraturan, keputusan, dan kebijakan pemerintah lainnya untuk keuntungan pribadi mereka. Penting untuk dicatat bahwa ketika membahas praktik oligarki dan *state capture*, negara dan ekonomi tidak dapat dipahami sebagai dua entitas yang terpisah. Kedekatan dan jaringan patronase antara oligarki dan pemerintah adalah faktor utama terjadinya praktik *state capture*. Dalam hal ini sebagaimana yang terlihat pada **tabel II**, kedekatan dan kontribusi Tanoto dengan pemerintahan lintas periode menjadi salah satu faktor politik yang melatarbelakangi dominasi Tanoto dalam bisnis.

Pengaruh politik Tanoto group dapat membelah kabinet pemerintahan di dua rezim yakni Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Fenomena ini memperkuat argumentasi dimensi despotik dalam *oligarchic state capture* bahwa ketidakmampuan penegak hukum dan lembaga-lembaga negara untuk menerapkan pemaksaan terhadap pelaku swasta yang mengeksploitasi negara - hal ini ditunjukkan pada keputusan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid untuk menutup dan menghentikan produksi PT IIU (TPL) yang tak dapat diterapkan. Kekuatan modal material dan jaringan politik yang dimiliki oleh Tanoto Group dapat mengintervensi

otonomi pemerintahan. Osbin Samosir (2007) dalam bukunya berjudul *Salus Populi dari Tano Batak: Studi Kebijakan Pemerintah Pusat atas Konflik Indorayon (PT IIU/PT TPL) pada Periode 1998-2003* menyebutkan kekuatan politik Tanoto sebagai "menggoreng ikan besar: BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid". Seluruh pemerintahan repot, bahkan presiden turun tangan dan hasilnya berubah-ubah pula. Jika kita identifikasi, faktor ketergantungan pemerintahan terhadap Tanoto sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Osbin Samosir (2007) lebih di dominasi oleh faktor modal material dan serapan ketenagakerjaan yang tinggi (Samosir, 2008).

Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL

Asal muasal konflik Masyarakat Adat dengan PT IIU/PT TPL bermula saat pendirian pabrik dan aktivitas produksinya yang menyebabkan pencemaran tanah, deforestasi besar-besaran, dan perampasan tanah secara tidak adil. Demonstrasi dan tindakan hukum oleh Masyarakat Adat yang telah dimulai sejak 1986 gagal menghentikan aktivitas pabrik yang pada gilirannya dijawab dengan penahanan, penangkapan, pemukulan, penggrebakan dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan setempat. Bahkan, pada tahun 1999 terjadi bentrokan antara Masyarakat Adat yang menolak kehadiran PT IIU/PT TPL dengan aparat keamanan mengakibatkan enam kematian dan ratusan luka-luka (HAM, 2016).

Masyarakat Adat Batak Toba, di dataran tinggi Sumatera Utara yang memiliki tradisi penyadapan getah kemenyan toba dari praktik tumpang sari mereka. Menurut data AMAN, terdapat 41 Komunitas Masyarakat Adat Batak Toba yang berbatasan langsung dengan area konsesi TPL. Batak Toba adalah satu dari enam suku Batak yang diakui dan mendiami kawasan utara Sumatera. Masyarakat Batak Toba memiliki hubungan erat dengan wilayah adat mereka, yang mereka kelola melalui hukum adat dan sesuai dengan norma-norma sosial tentang keturunan, kekerabatan, perkawinan, dan warisan yang tertanam dengan kuat. *Huta* (kampung) yang dibangun di atas wilayah adat yang sebelumnya tidak dihuni menandai batas wilayah adat dengan batasan yang disepakati melalui musyawarah dan persetujuan sesama. Namun, pada tahun 2004 mereka mendapati bahwa semua wilayah adat mereka telah dialokasikan untuk perusahaan pulp dan kertas, Toba Pulp Lestari (TPL), untuk lahan konsesi perkebunan kayu *Eucalyptus* (HAM, 2016).

Permohonan yang berulang kali mereka sampaikan kepada Pemerintah agar wilayah adat mereka dikembalikan diabaikan tanpa digubris. TPL terus melakukan praktek perampasan wilayah adat dan merambah hutan peninggalan leluhur mereka, menghancurkan pohon damar dan sumber daya lainnya, sehingga mengganggu pekerjaan tradisional mereka yang secara signifikan memiskinkan mereka. Perampasan PT TPL terjadi meluas, tidak hanya di satu lokasi, hampir sebagian besar Masyarakat Adat Batak Toba dirugikan oleh konsesi TPL yang berdampak merusak ruang hidup Masyarakat Adat. Lokasi konsesi /TPL yang bersinggungan dengan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta misalnya, berada di area seluas 107.037 Ha meliputi 4 Kabupaten (Humbahas, Tobasa, Dairi, dan Pakpak Barat). Konflik mencuat ketika TPL mendekati wilayah adat tahun 2009 dimana perusahaan melakukan penebangan secara membabi buta terhadap pohon kemenyan milik Masyarakat Adat. Letupan-letupan konflik antara Masyarakat Adat dengan TPL ini berlangsung sudah lebih dari tiga dekade tanpa ada penyelesaian yang berarti. Perlawanan elemen masyarakat, khususnya Masyarakat Adat, Dimpos Manalu (2007) telah mengkategorikan episode gerakan

perlawanan masyarakat terhadap dominasi TPL yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Trajektori Perlawanan Masyarakat Terhadap PT IIU/TPL

Periode Gerakan Rakyat	Isu/Tuntutan	Bentuk Aksi	Respon PT IIU/TPL
1986-1992; Perlawanan sporadis	<ul style="list-style-type: none"> ● Ganti rugi ● Pengembalian wilayah adat ● Pencabutan izin operasional 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlawanan langsung; bentrok ● Demonstrasi ● Gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendekatan elite dan budaya ● Manipulasi hukum adat (pago-pago) ● Bersedia secara parsial menerima tuntutan ganti rugi ● Mengembalikan tanah rakyat total 1.600 ha
1993; Embrio perlawanan bersama	<ul style="list-style-type: none"> ● Tutup indorayon ● Ganti rugi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Demonstrasi ● Perlawanan langsung; bentrok 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendekatan elite: Kesepakatan YTP Arjuna ● Memberikan janji-janji yang tidak dipenuhi
1994 - 1997; Penurunan dan deradikalisasi gerakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Ganti rugi ● Audit total ● Tutup indorayon 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dialog dengan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan perubahan teknologi secara parsial ● Memberikan ganti rugi secara parsial
1998 - 2002: Bangkitnya gerakan bersama yang masif dan solid	<ul style="list-style-type: none"> ● Tutup Indorayon secara permanen dan no audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Demonstrasi ● Blokade ● Perlawanan langsung; bentrok 	<ul style="list-style-type: none"> ● Total 4 tahun tidak beroperasi karena perlawanan masyarakat ● Rekayasa kesepakatan ● Mendorong organisasi dan LSM tandingan

			<ul style="list-style-type: none"> ● Janji Paradigma Baru
2003 - 2005; Mengarah ke stagnasi gerakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Tutup Indorayon secara permanen 	<ul style="list-style-type: none"> ● Demonstrasi ● Blokade ● Mogok pasar, sekolah, aksi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementasi paradigma baru tanggung jawab sosial perusahaan YPMT/S dan pengembangan masyarakat
2012 - 2024; Perluasan aliansi gerakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Tutup total PT TPL ● Cabut izin konsesi HPH/TI TPL ● Kembalikan wilayah adat yang diklaim sebagai konsesi TPL ● Pemerintah harus mengakui dan melindungi wilayah adat ● Hentikan tindakan represif dan upaya kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat ● Tarik segera aparat Brimob yang melindungi operasional TPL 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk sekretariat bersama Gerakan Rakyat Tutup Total TPL ● Gerakan jalan kaki tiga warga dari Danau Toba, Sumatera Utara ke Jakarta untuk bertemu Presiden dan menyampaikan desakan tutup TPL 	<ul style="list-style-type: none"> ● TPL mendorong dialog secara terbuka untuk mencari solusi bersama ● Perseroan mendorong kerja sama pola kemitraan perhutanan sosial dalam bentuk naskah kerja sama kemitraan dengan masyarakat ● TPL meragukan kapasitas tiga warga yang melakukan gerakan jalan kaki sebagai perwakilan dari Masyarakat Adat

Sumber: Dimpos Manalu (2007)

Tabel di atas tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan konflik dan gerakan perlawanan yang muncul akibat eksploitasi TPL selama tiga dekade belakang. Kebijakan pemerintah mempertahankan perusahaan pada kenyataannya tidak selalu dilandasi oleh rasionalitas murni. Di dalamnya acap kali terselip kepentingan-kepentingan tertentu para pelaksana kebijakan, apakah itu kepentingan politik kekuasaan, akses finansial, relasi individual, dan lain sebagainya (Manalu, 2007). Trajektori konflik dan perlawanan pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketimpangan material yang ekstrem menghasilkan konflik dan perlawanan. Persoalan utama yang dihadapi oleh Masyarakat Adat adalah perampasan wilayah adat dan ruang hidup yang begitu masif terjadi. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan pun belum menghasilkan kesetaraan kekuasaan

antara Masyarakat Adat dan TPL, sehingga yang terjadi adalah TPL mendominasi dan dapat dengan mudah melemahkan gerakan Masyarakat Adat.

Mobilisasi dan Kekuatan Koersif

Mobilisasi aparat dan penggunaan kekuatan koersif seringkali dilakukan oleh oligarki untuk mempertahankan sumber dayanya. Menurut KOMNAS HAM RI (2016) dalam bukunya *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan* menjelaskan dalam banyak kasus, perlawanan Masyarakat Adat akibat penguasaan dominan dan perampasan yang dilakukan oleh oligarki seringkali berujung pada kriminalisasi dan penertiban oleh aparat keamanan. Perlawanan Masyarakat Adat terhadap pencemaran dan deforestasi akibat eksploitasi PT IJU/TPL pada tahun 1986 misalnya, selama perlawanan tersebut kekerasan dan teror oleh petugas polisi militer yang disewa oleh perusahaan masif terjadi. Bahkan, bentrokan antara Masyarakat Adat dan anggota pasukan keamanan yang disewa oleh perusahaan berujung pada enam orang tewas dan ratusan luka-luka pada tahun 1999. Tragedi kekerasan dan teror tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Pada 24 Juli, 2024 lalu, lima orang warga Masyarakat Adat Sihaporas yang berada di kawasan konsesi PT TPL diculik oleh segerombolan orang tak dikenal. Gerombolan ini datang dengan membawa 50 orang menggunakan pakaian bebas dan mengendarai mobil milik petugas keamanan PT TPL (Doni, 2024). Gerombolan ini juga melakukan kekerasan fisik. Mereka juga membakar rumah-rumah warga sekitar dan menahan 5 (lima) orang warga Masyarakat Adat Sihaporas di Polres Simalungun yang sekaligus mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pengrusakan secara bersama-sama. Dalam tiga dekade kebelakang, kriminalisasi, penggunaan kekuatan koersif hingga mobilisasi aparat seringkali dihadapi oleh Masyarakat Adat, sebagaimana dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Mobilisasi Aparat dan Penggunaan Kekuatan Koersif Dalam Mengamankan TPL

No	Kriminalisasi	Deskripsi Kasus	Mobilisasi Aparat
1	Pengeledahan dan Penangkapan Paksa 16 orang warga Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta tahun 2009	Secara tiba-tiba 5 truk polisi dan 3 mobil patroli dengan sekitar 200 aparat datang dan mengepung rumah-rumah warga yang dianggap sebagai pimpinan kelompok gerakan perlawanan TPL	200 aparat polisi dan Brimob mengobrak-abrik rumah warga secara paksa dan menciduk warga Masyarakat Adat
2	Kriminalisasi petani kemenyan di Humbahas tahun 2012	Menolak penghancuran hutan Kemenyan, 8 orang tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)	Rabu, 19 September 2012, warga Masyarakat Adat berangkat ke kebun dan menemukan pekerja TPL sedang membuka jalan baru dengan

			menggunakan alat berat ekskavator, dikawal security TPL dan oknum Brimob memakai kaos oblong lengkap dengan senjata laras panjang. Warga mendekat untuk memperingatkan supaya menghentikan penebahan pohon kemenyan, tetapi dihadang oleh petugas Brimob.
3	Penangkapan 31 orang Petani Kemenyan pada tahun 2013	Petani kemenyan melarang pekerja TPL beraktivitas dalam kebunnya. Namun, pekerja TPL bersama aparat (Brimob) lengkap dengan senjata laras panjang berbalik arah menyerang para petani kemenyan. Konflik ini berujung pada penangkapan 31 orang petani kemenyan.	Brimob bersenjata laras panjang dan polisi bersama para pekerja TPL

Sumber: *diolah* Penulis 2024

Mobilisasi aparat dan penggunaan kekuatan koersif untuk mengamankan TPL ini terus dilakukan dan hampir setiap tahun terjadi kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat di sekitar kawasan konsesi TPL. Kriminalisasi tersebut tidak sedikit yang berujung pada penahanan karena Masyarakat Adat kalah dalam pengadilan. Hubungan antara oligarki dan pemerintah dapat kita lihat dari tindakan-tindakan mobilisasi aparat dan penggunaan kekuatan koersif sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas. Hanya pemerintah yang dapat melakukan monopoli atas cara pemaksaan yang sah. Dan, kemampuan untuk memaksa ini yang dibutuhkan oleh oligarki. Oleh sebab itu, oligarki membutuhkan Negara untuk melakukan ekspansi kekayaan secara *legitimate*.

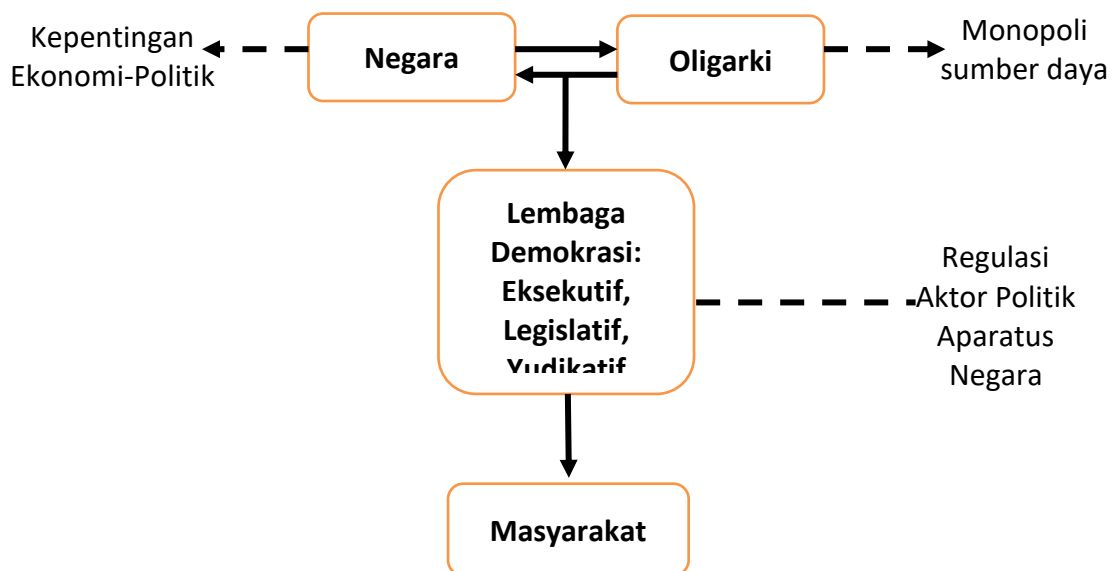
Barter Kepentingan antara Negara dan Oligarki Dalam Kasus TPL versus Masyarakat Adat

Negara dan oligarki adalah entitas politik yang saling ketergantungan. Dalam kasus TPL versus Masyarakat Adat dapat kita lihat bahwa Negara membutuhkan oligarki dalam kepentingan ekonomi-politik, sementara oligarki membutuhkan Negara untuk mempertahankan atau bahkan menambah kekayaannya - relasi kedua entitas ini adalah relasi timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itu, untuk menjalankan dua kepentingan tersebut, Negara menggunakan kewenangannya yang meliputi; regulasi, kebijakan, mobilisasi birokrasi dan aparat keamanan, mengintervensi peradilan hingga mengatur hak kepemilikan agar tidak menyulitkan Oligarki. Sebaliknya,

oligarki kemudian menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan investasi menggunakan kekuatan materialnya hingga memobilisasi jaringan pemodal untuk memenuhi kepentingan ekonomi Negara. Keragaman kekuatan material ini lah yang membuat oligarki begitu signifikan secara politis dalam 'mengendalikan' kebijakan Negara.

Dalam buku *Oligarchy* karya Jeffrey Winters dikatakan bahwa meskipun ada perluasan kebebasan politik dan demokrasi sepanjang sejarah, kaum oligarki selalu berhati-hati dengan masyarakat demokratis yang mengancam kekayaan mereka. Lebih lanjut Winters mengatakan oligarki dan demokrasi dapat hidup berdampingan secara damai. Penelitian ini membantah argumentasi keharmonisan antara oligarki dan demokrasi dengan temuan bahwa justru oligarki mengendalikan demokrasi menggunakan kekuatan materialnya - sebagaimana yang terjadi dalam konflik TPL dan Masyarakat Adat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Bagan 2. Barter Kepentingan antara Negara dan Oligarki



Pengendalian oligarki atas demokrasi terjadi ketika terdapat barter kepentingan antara Negara dan oligarki sebagaimana yang terlihat pada gambar di atas. Negara memiliki kepentingan ekonomi-politik dan oligarki memiliki kepentingan untuk pertahanan kekayaan dan monopoli sumber daya. Negara melalui lembaga-lembaga demokrasi yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi dan memobilisasi aparatus negara kemudian dapat dikendalikan oleh oligarki demi mempertahankan kekayaannya. Pada penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bagaimana oligarki TPL bahkan dapat membuat kabinet Pemerintahan Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid menjadi terbelah. Bahkan, Pemerintahan Presiden Habibie mengalami dilema antara menutup PT IIU/TPL atau membiarkan aktivitas eksplorasi PT IIU/TPL yang sebetulnya telah memicu beragam perlawanan masyarakat. Fenomena

tersebut semakin menguatkan kesimpulan bahwa kekuatan material oligarki dapat mengendalikan demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap pola dominasi oligarki PT TPL terhadap negara melalui monopoli sumber daya dan jaringan politik yang kuat. Tanoto Group, sebagai pemilik PT TPL, memanfaatkan kekuatan material dan hubungan dengan pemerintah untuk mengintervensi otonomi negara, bahkan mengabaikan keputusan Presiden untuk menutup perusahaan. Ketergantungan pemerintah terhadap kekuatan material oligarki menciptakan relasi timbal balik yang saling menguntungkan; negara menyediakan legitimasi melalui regulasi, kebijakan, dan aparat koersif, sementara oligarki memberikan kontribusi ekonomi seperti investasi dan lapangan pekerjaan. Relasi ini memunculkan ketimpangan material yang melahirkan konflik berkepanjangan serta mengukuhkan dimensi despotik dalam *oligarchic state capture*.

Terjadi reorganisasi Oligarki Tanoto saat peralihan antara rezim Soeharto ke reformasi. Hal ini memperkuat hipotesis utama Richard Robinson dan Verdi R. Hadiz (2004) bahwa Oligarki rezim Soeharto mampu bertahan dan mempengaruhi proses politik pada masa reformasi. Perubahan PT Indorayon Utama (IIU) ke PT TPL bukan hanya sekedar perubahan nama, namun juga disertai dengan perubahan strategi pertahanan oligarki Tanoto secara politik. Sejak reformasi hingga saat ini penggunaan aparat negara oleh PT TPL untuk mengamankan konflik dengan Masyarakat Adat mengindikasikan bahwa terdapat relasi yang kuat antara Pemerintah dan PT TPL. Gejolak Peralihan Orde Baru ke Reformasi menghasilkan gejolak bagi PT IIU saat Presiden BJ Habibie menyatakan menutup PT Indorayon Utama. Kondisi ini memaksa reorganisasi oligarki Tanoto untuk memperluas pengaruhnya kepada Pemerintahan baru untuk tetap bertahan. Strategi tersebut tampaknya berhasil yang ditunjukkan dengan pengaruh kekuatan politik Tanoto Group bahkan dapat membelah kabinet pemerintahan di dua rezim yakni Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Ditengah ketidakpastian kapitalisme pada masa reformasi, upaya reorganisasi oligarki secara politik dengan mulai mengintervensi regulasi, pemerintahan hingga proses demokrasi adalah cara untuk mempertahankan kekayaan. Peluang reformasi mendorong Oligarki untuk mengintervensi ruang kompetisi demokrasi. Berdasarkan temuan yang ada, penelitian ini mempertegas bahwa Oligarki dapat mengendalikan demokrasi menggunakan kekuatannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami kepada para narasumber penelitian yang telah membantu kami menyusun penelitian yang komprehensif dan mendalam terkait dominasi oligarki dalam konflik antara Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari.

Daftar Pustaka

- KPA. (2021, November 17). *kpa.or.id*. Diambil kembali dari Presiden Jokowi Segera Cabut Izin dan Tutup PT Toba Pulp Lestari: <https://www.kpa.or.id/2021/11/17/presiden-jokowi-segera-cabut-izin-dan-tutup-pt-toba-pulp-lestari/>
- Radikal Lukafiardi, R. A. (2022, Januari 7). *Diagnosis Persoalan Tata Kelola Perizinan Tambang*. Diambil kembali dari pwpindonesia.org: <https://pwpindonesia.org/id/diagnosis-persoalan-tata-kelola-perizinan-tambang/>
- Sholahudin Al Ayubi, R. R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2534.
- Capussela, A. L. (2021). State Capture and Collective Action. *Journal of Regional Security*, 127 - 150.
- Marandici, I. (2021). Taming the Oligarchs? Democratization and State Capture: The Case of Moldova. *Demokratizatsiya; The Journal of Post-Soviet Democratization*, 61-88.
- Hale, H. (2015). Politik Patronal: Dinamika Rezim Eurasia dalam Perspektif Komparatif. *Cambridge University Press*; .
- KPA. (2021, November 17). *Konsorsium Pembaruan Agraria*. Diambil kembali dari [kpa.or.id](https://www.kpa.or.id): <https://www.kpa.or.id/2021/11/17/presiden-jokowi-segera-cabut-izin-dan-tutup-pt-toba-pulp-lestari/>
- Walhi, A. d. (2022). *Indonesia Tanah Air Siapa; Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*. Jakarta : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Auriga Nusantara.
- Marandici, I. (2017). *Oligarchic State Capture: Wealthy Elites and State Autonomy in Communist and Postcommunist Countries*. New Brunswick: New Jersey.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Tsai, K. (2007). *Capitalism without Democracy: The Private Sector in Contemporary China*. New York: Cornell University Press.
- Dahl, R. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis*. Surakarta: Rajawali Press.
- Ramseyer J., M. a. (1995). *The Politics of Oligarchy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Oscar Bulaong Jr., G. A. (2022). Cronyism, Oligarchy and Governance in the Philippines: 1970 vs 2020. *Taylor & Francis Group*, 174-187.
- Joel S. Hellman., G. J. (2000). State Capture, Corruption, and Influence in Transition. *Policy Research Working Paper*, 244.
- Skocpol, T. (2010). *Bringing the State Back In*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Forbes. (2023, January 5). *Forbes*. Diambil kembali dari Sukanto Tanoto: https://www-forbes-com.translate.google/profile/sukanto-tanoto/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Tempo. (2021, Februari 6). Mainan Baru Tanoto. *Edisi 6 Februari*.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- KLHK. (2022). *Statistik 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: KLHK.

- Hutan, K. A. (2018). *Reliabilitas dan Akuntabilitas Dalam Penatausahaan Hasil Kayu: Lemahnya Pengawasan dan Penindakan Peluang Korupsi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Koalisi Anti Mafia Hutan.
- Samosir, O. (2008). *Salus Populi Dari Tano Batak: Studi Kebijakan Pemerintah Pusat atas Konflik Indorayon pada Periode 1998 - 2003*. Jakarta: Jala Permata.
- HAM, K. (2016). *Inkuiri Nasional Komnas Ham: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Manalu, D. (2007). Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*.
- Hadiz, R. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Doni. (2024, Juli 24). Kasus Penculikan Warga Masyarakat Adat Sihaporas. (Y. Hidayat, Pewawancara)